

2019 ANNUAL REPORT

A Year of Accomplishments.

PERKUMPULAN IDE DAN ANALITIKA
INDONESIA

(0274) 488427 | www.perkumpulanidea.or.id | Jl. Tunjung No 10 Yogyakarta

Daftar Isi

i PENGANTAR
- Visi Misii
- Citra Diri
- Isu Strategis
- Struktur Lembaga
- Wilayah Kerja

1 BAGIAN 1
POTRET KINERJA PENGANGGARAN DAERAH UNTUK PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN

6 BAGIAN 2
MEMPERKUAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014

9 BAGIAN 3
KETERBUKAAN DATA UNTUK PEMENUHAN HAK KELOMPOK RENTAN

16 BAGIAN 4
MENDORONG PEMILU BERSIH DAN ANTI POLITIK UANG

18 BAGIAN 5
AUDIT SOSIAL UNTUK PENGAWASAN PEMBANGUNAN

21 BAGIAN 6
MEMPERKUAT KAPASITAS INTERNAL UNTUK MOBILISASI SUMBERDAYA

24 BAGIAN 7
LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2019

26 PENUTUP

PENGANTAR

IDEA didirikan pada 20 Mei 1995 dengan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih SH, M.Hum Nomor 25 Tanggal 22 April 2004, dan diperbarui dengan Akta Notaris Athanasia Dhian Santi, SH, M.Kn Nomor 02 Tahun 2020. Akta tersebut telah diverifikasi dan diresmikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Kemenkumham Nomor No. AHU-0000463.AH.01.08.Tahun 2020. Analitika Indonesia juga telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) 0220103611224. Sesuai mandatnya, Perkumpulan IDEA didirikan sebagai bagian upaya mendorong pelembagaan mekanisme politik dan kebijakan publik yang menghormati HAM, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya.

IDEA sebagai organisasi non-pemerintah memutuskan untuk menjadi bagian dalam proses transformasi sosial di Indonesia. Satu dekade terakhir ini, perubahan dramatis terjadi dalam tata pemerintahan di Indonesia sehingga menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun perubahan ini belum tentu menjamin akses kelompok-kelompok rentan terhadap sumber daya, karena pada saat yang sama, tarik-menarik kekuatan yang bekerja pada kebijakan publik di Indonesia tidak searah dengan kepentingan kelompok rentan.

IDEA memfokuskan energinya pada pendidikan populer dan advokasi kebijakan anggaran di tingkat pusat serta daerah. Kebijakan anggaran adalah kebijakan yang mengatur alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber daya publik. Dengan demikian maka kebijakan anggaran sangat strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan milenium, kesetaraan & keadilan gender, pengurangan risiko bencana atau pun untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

Kebijakan anggaran pada akhirnya menjadi kebijakan politik karena banyaknya pihak yang berkepentingan atas ketersediaan sumber daya publik yang terbatas. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak asasi kelompok rentan, maka dibutuhkan sistem kebijakan anggaran yang deliberatif. Dorongan untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan publik.

IDEA telah berperan dalam berbagai proses transformasi sosial selama kurun waktu 25 tahun organisasi ini didirikan. Peran-peran tersebut adalah mendorong gerakan anti korupsi di Indonesia, menerbitkan berbagai penelitian dan buku tentang sistem penganggaran di Indonesia. IDEA terlibat dalam berbagai jejaring koalisi CSO dalam gerakan anti korupsi, gerakan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, gerakan mendorong keterbukaan informasi publik, Open Government Partnership dan tata kelola industri ekstraktif dan sumber daya alam di Indonesia.

TENTI NOVARI KURNIAWATI
Direktur Eksekutif IDEA

VISI

Terwujudnya kedaulatan rakyat di ranah publik yang ditandai oleh pemenuhan hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya rakyat.

MISI

Mendorong proses-proses politik yang demokratis untuk pemenuhan hak-hak dasar warga melalui perubahan kebijakan, penguatan basis dan peningkatan kesadaran publik.

CITRA DIRI

Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) adalah organisasi yang bergerak dalam hal riset, advokasi, konsultansi, peningkatan kapasitas dan pengorganisasian basis dengan keberpihakan ditujukan kepada kelompok rentan yang terhalang aksesnya terhadap pelayanan hak-hak dasar. Sumber pendanaannya berasal dari iuran anggota, hibah pegiat, pengelolaan IRC (Ide dan Analitika Indonesia Resource Center) dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip organisasi, dengan wilayah kerja mencakup lokal (Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi) Nasional dan global.



ISU STRATEGIS

- Mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang mencakup pada pengelolaan anggaran di tingkat desa, Kab/Kota, Provinsi serta Nasional dan global.
- Mendorong pengarusutamaan hak warga yang tereksklusi (kelompok rentan, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya) tanpa mengeksklusi aktor yang lain.
- Meningkatkan pengelolaan pengetahuan sebagai penyedia informasi dan produk pengetahuan untuk pengembangan program dan advokasi yang lebih tua dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi.
- Mewujudkan lembaga yang memiliki tata kelola organisasi masyarakat sipil yang baik.

DEWAN KONSTITUANTE



RIDAYA LAODENGKOWE
ANGGOTA



WASINGATU ZAKIYAH
KETUA



DENY P SAMBODO
ANGGOTA

DEWAN PENGAWAS



TIEM FARIKAH USMAN
KETUA



WAHYU W BASJIR
ANGGOTA

PENGURUS



DEDY HERIYANTO
ANGGOTA

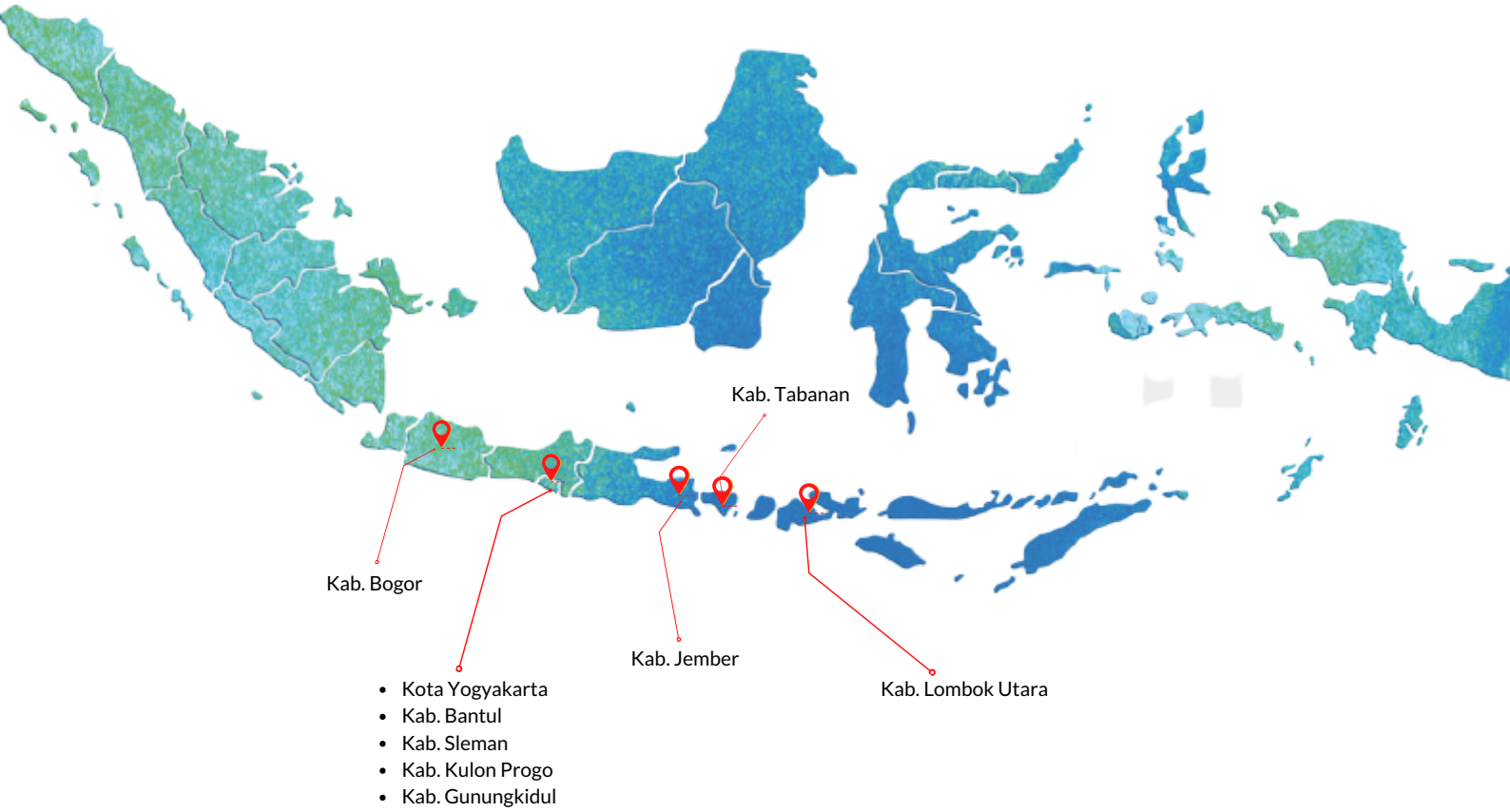


TENTI NOVARI K
KETUA



YITRA AMBAR R
ANGGOTA

WILAYAH KERJA IDEA
TAHUN 2019



- Kota Yogyakarta
- Kab. Bantul
- Kab. Sleman
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Gunungkidul

BAGIAN 01

Potret Kinerja Penganggaran Daerah untuk Pemenuhan Hak Kelompok Rentan

Situasi politik di Indonesia pada tahun 2019 sangat dinamis karena adanya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada 17 April 2019. Situasi ini berdampak pada kondisi di masyarakat dimana publik saling beradu argumen atas pilihan masing-masing adalah pilihan yang terbaik. Debat substansi program para kandidat di ruang-ruang publik baik secara virtual maupun secara langsung belum menjadi tradisi dalam setiap prose pemilu. Dalam situasi yang demikian, organisasi masyarakat sipil sebagai aktor intermediary harus bisa menjadi jembatan dan berposisi menyediakan data, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pendidikan politik dan kewarganegaraan yang tepat untuk pemenuhan hak. Organisasi masyarakat sipil dapat memfasilitasi debat-debat dalam ruang publik substansi program sehingga mimpi demokrasi substantif dapat terwujud dibandingkan dengan demokrasi prosedural.

sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah beraktivitas selama hampir 25 tahun dalam advokasi pemenuhan hak-hak masyarakat berusaha konsisten memperjuangkan nilai-nilai dalam mandat organisasi sebagai organisasi yang mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga dan perbaikan tata kelola kebijakan dan anggaran. Program-program yang dirancang pada Tahun 2019 diharapkan berkontribusi terhadap proses Pemilu yang lebih substantif serta meningkatkan kapasitas warga dalam literasi digital dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Program kampanye pemilu bersih dan anti politik uang adalah salah satu langkah mengawal Pemilu agar tidak terjebak pada kampanye negatif dan politik uang untuk mendapatkan suara. Selain itu, literasi digital dengan program open data gender di desa merupakan salah satu agenda agar teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk menyajikan data-data yang berguna untuk pemenuhan hak-hak dasar warga.

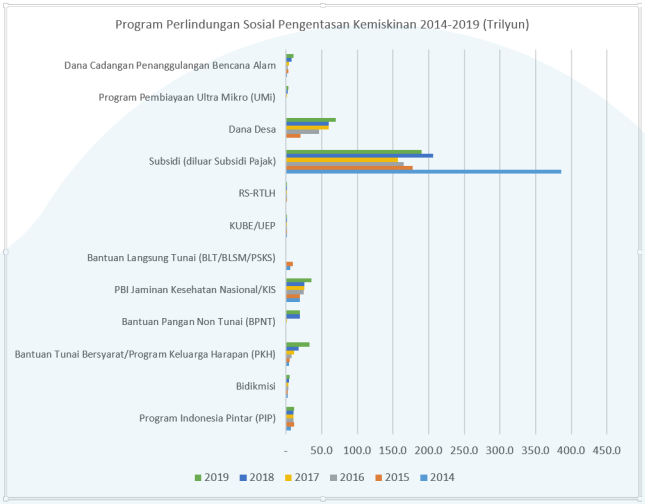
Di sisi yang lain, advokasi kebijakan melalui perbaikan tata kelola data kemiskinan juga menjadi langkah maju agar pemerintah dalam mengambil kebijakan program penanggulangan kemiskinan berbasis data yang lebih valid. Mandat TPB (Target Pembangunan Berkelanjutan) point pertama adalah menghapus kemiskinan. Pemerintah DIY memasang target tahun 2019 tingkat kemiskinan turun menjadi 11,7%. Program-program untuk menurunkan tingkat kemiskinan daerah sesuai target SDGs diantaranya adalah penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan, jaminan sosial bidang ketenagakerjaan formal dan non formal, penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/PKH graduasi, persentase rumah tidak layak huni, meningkatnya akses air minum layak dan program lainnya.

Kehadiran UU Desa Nomor 4 tahun 2014 juga menjadi ruang strategis dalam memastikan tata kelola kebijakan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. UU ini menjadi landasan dalam memastikan perbaikan tata kelola data dan sistem perencanaan penganggaran di desa dapat berjalan sesuai mandat organisasi untuk pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Apalagi, dalam potret kebijakan anggaran baik di level nasional maupun daerah sampai dengan desa, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam hal alokasi, distribusi sumberdaya, penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia, serta aspek lainnya. Oleh karena itu, IDEA mendedikasikan sumberdaya yang ada untuk penguatan organisasi basis dan kelompok rentan, penguatan tata kelola data dan tata kelola pemerintahan.-

IDEA mendorong dan memperkuat gerakan pengarusutamaan gender dalam konteks UU Desa untuk memastikan pemenuhan hak kelompok gender minoritas.

Potret Kinerja Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan selalu menjadi target kebijakan politik dalam setiap pergantian kepemimpinan di Indonesia maupun daerah. Alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan juga selalu di gelontorkan triliunan rupiah setiap tahun dengan 12 paket program sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Program Perlindungan Sosial Pengentasan Kemiskinan Tahun 2014-2019.
Sumber:http://www.dataapbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016.

Belanja perlindungan sosial di Indonesia dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 kenaikannya sangat signifikan, terutama dari tahun 2018 ke tahun 2019 data Rp.161,5 Triliun menjadi 200,8 Triliun atau naik lebih dari Rp. 40 Triliun. Berdasarkan data Kemenkeu Program -program perlindungan sosial tersebut adalah: -

- Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya alokasi Program Perlindungan Sosial bagi 40% penduduk termiskin Peningkatan peserta PBI JKN menuju ke 96,8 juta jiwa.
- Memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat (bersyarat) dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.
- Sasaran Bantuan Pangan non tunai ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat

Sementara itu, sebagimana Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul Tahun 2019, angka kemiskinan pada bulan September 2019 menurut data BPS sebesar 9, 22% atau 24,79 juta orang, angka ini turun sebesar 0,19 % dari bulan Maret 2019. Meskipun demikian, di lapangan masih banyak warga miskin yang seharusnya masuk kategori warga miskin tidak terdata, dan sebaliknya terdata sebagai warga miskin namun seharusnya sudah tidak masuk dalam kategori warga miskin. Bagaimana dengan situasi kemiskinan di daerah? apakah juga mengalami penurunan angka kemiskinan? Berikut ini contoh gambaran situasi kemiskinan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 13,43%, selanjutnya sesuai dengan dokumen RPJMD DIY 2017-2022 untuk tahun 2019 diharapkan angka kemiskinannya menjadi 10,86%. Dengan target RPJMD DIY untuk penurunan tingkat kemiskinan, seluruh kabupaten/kota di DIY dibebani program-program untuk penurunan angka kemiskinan. Kabupaten Bantul misalnya, untuk program pemenuhan dasar telah menyasar 64.953 KPM untuk program PKH, 81.630 KPM program BPNT, 76.699 KPM untuk program KIS PBI APBD xn 484.079 KIS PBI APBN.

Selain itu, Bantul juga memiliki program pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui dana bergulir (PEKM dan KUPK, pemberdayaan WRSE, padat karya dan pelatihan). Program-program penanggulangan kemiskinan juga memfokuskan pada perbaikan data DT PPFM atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yaitu memaksimalkan entry data ke dalam aplikasi SIKS NG yang merupakan hasil dari Musyawarah tingkat Desa untuk cleaning data inklusi dan eksklusi error. Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul misalnya mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang berbasis masyarakat seperti dibukanya objek wisata baru yang berbasis alam dan pedesaan, pengembangan sentra-sentra kerajinan, dan usaha-usaha kuliner baru.

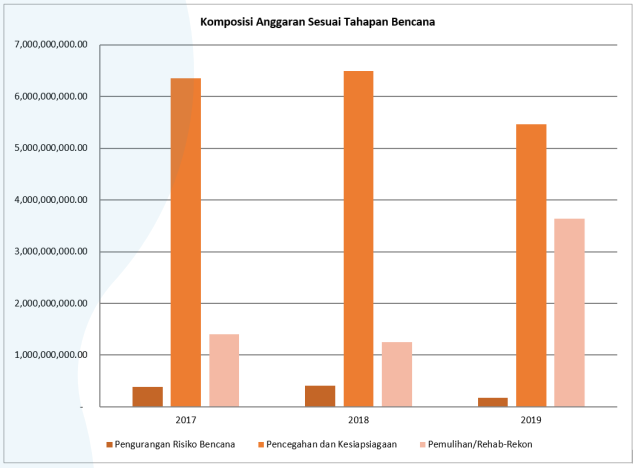
Dari ragam intervensi program penanggulangan kemiskinan baik yang sifatnya targeted maupun kelompok dan berbasis pendampingan dan pemberdayaan, IDEA memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Pentingnya perbaikan tata kelola data kemiskinan baik di pemerintah pusat maupun daerah..
2. Pentingnya penggunaan dana publik yang efektif dan efisien untuk penanggulangan kemiskinan.
3. Pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan mandatnya.
4. Pentingnya akuntabilitas sosial dampak program penanggulangan kemiskinan sehingga benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan.

Potret Anggaran Pengurangan Resiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perkumpulan IDEA setiap tahun melakukan analisis APBD dengan berbagai perspektif, salah satunya analisis anggaran dengan perspektif pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim. Pada tahun 2019, analisis APBD yang dilakukan dengan perspektif tersebut mengambil kasus Kabupaten Sleman,Daerah Istimewa Yogyakarta mengingat Kabupaten Sleman masih dalam masa level II atau waspada. Trend belanja PRB Tahun 2017-2019 Kabupaten Sleman mengalami penurunan, padahal secara umum belanja daerah mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 belanja BPBD sebesar Rp 13.782.108.980,- atau hanya 0,55% dari belanja daerah. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 12.138.273.230,- atau hanya 0,46% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan tetapi masih dibawah tahun 2017, yaitu sebesar Rp 12.138.273.230,- atau 0,43%. Padahal Kabupaten Sleman merupakan daerah berisiko tinggi terhadap ancaman bencana khususnya ancaman letusan atau erupsi Gunung Merapi.

Anggaran penanggulangan bencana selain ada di BPBD, juga ada di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial. Apabila digolongkan, maka akan ada 3 kelompok kegiatan, yaitu untuk pengurangan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta pemulihan. Sedangkan untuk respon darurat anggarannya ada di Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan dikeluarkan untuk darurat bencana. Dinas Lingkungan Hidup untuk pengurangan resiko bencana dialokasikan Rp. 53,3 milyar. Program yang diimplementasikan diantaranya adalah Program Perlindungan dan Konservasi SDA, pengelolaan ruang terbuka hijau, dan - pengelolaan persampahan. Dinas Sosial juga mengalokasikan anggaran untuk program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sementara itu, Dinas PU juga mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya sebesar RP.3,7 Miliar.



Grafik 2. Komposisi Anggaran Penanggulangan Bencana Tahun 2017-2019
Sumber: IDEA, Diolah dari Dokumen APBD Kab. Sleman Tahun 2017-2019

Rekomendasi IDEA atas situasi diatas adalah:

- Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa perlu meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat ancaman, risiko dan kerentanan wilayahnya.
- Setiap perencanaan pembangunan harus berperspektif pengurangan risiko bencana, karena penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab semua pihak.
- Adanya keterpaduan program penanggulangan bencana antar OPD, antar jenjang pemerintah, antara lembaga non pemerintah dan swasta, maupun antara lembaga pemerintah dengan lembaga non pemerintah dan swasta.

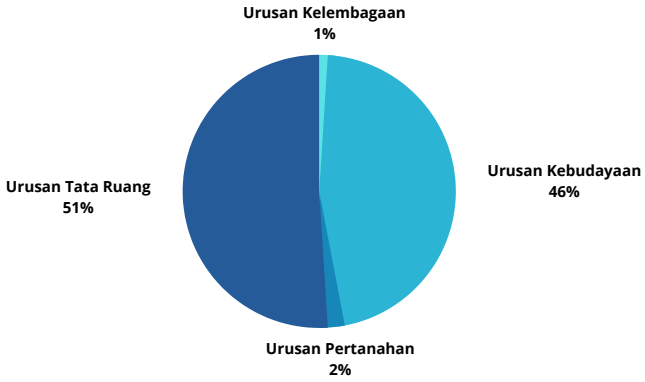
Potret Kinerja Anggaran Dana Keistimewaan DIY

UU Keistimewaan DIY Nomor 13 Tahun 2012 telah berjalan 7 tahun dengan alokasi anggaran Rp.231 Miliar pada Tahun 2013, dan terus meningkat setiap tahun. Tahun 2019 alokasi dana keistimewaan DIY mencapai Rp.1,2 Triliun atau setara dengan belanja langsung kabupaten/kota se DIY. Dengan kenaikan 6 kali lipat sejak tahun 2013, bagaimana dampak penggunaan dana keistimewaan DIY untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana mandat UUK? Perkumpulan IDEA telah melakukan analisis sederhana atas penggunaan alokasi anggaran dana keistimewaan DIY Tahun 2019. Data dihimpun dari website resmi pemerintah DIY serta dokumen LKPJ Gubernur DIY tahun 2019.

Realisasi belanja dana keistimewaan DIY Tahun 2019 paling dominan pada urusan tata ruang yaitu 51% dan urusan kebudayaan 46%. Organisasi perangkat daerah pelaksana urusan tata ruang menyebar di kabupaten/kota DIY, diantaranya Dinas pertanahan dan tata ruang dan Dinas PU kabupaten Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dinas PUPESDM DIY menjalankan anggaran paling banyak sebesar Rp. 418,9 Miliar. Kegiatan tersebut untuk pemanfaatan ruang strategis Pantai Selatan, Karst Gunung Sewu, Perbukitan Menoreh, Kawasan Makam Raja-raja Mataram Imogiri dan Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo. Urusan kebudayaan banyak digunakan untuk program-program tata kelola warisan budaya dan cagar budaya, pendampingan desa budaya, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Yogya, pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan sebagainya.

Rekomendasi

- Informasi program, kegiatan dan anggaran dana keistimewaan DIY harus disajikan secara transparan dan akuntabel, misalnya melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
- Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan program dan anggaran dana keistimewaan DIY harus lebih intensif dan melalui dialog yang terbuka.



Grafik 3. Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2019

BAGIAN 02

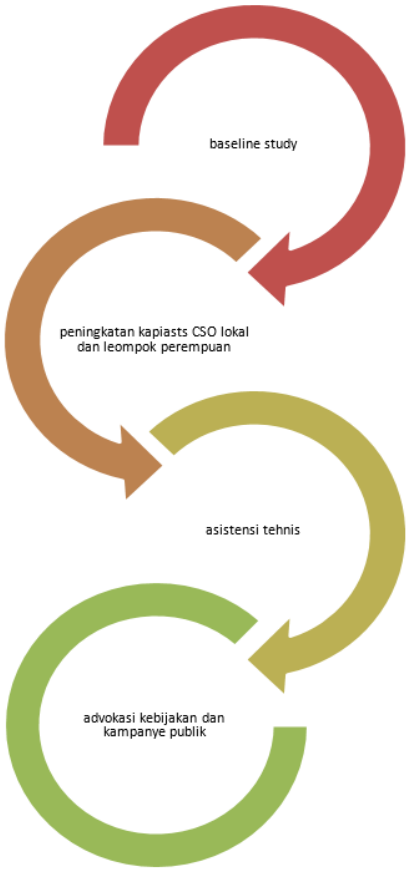
Memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014

A. Desa Responsif Gender

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah diimplementasikan selama 5 tahun di Indonesia dengan berbagai capaian, kendala dan tantangan. Salah satu mandat UU Desa adalah memastikan hak-hak warga desa terpenuhi dengan memaksimalkan sumberdaya dan potensi yang tersedia. Pemenuhan hak warga desa terutama kelompok rentan menjadi tantangan tersendiri karena kelompok rentan selama ini masih tereksklusi dalam pembangunan. Desa Responsif Gender merupakan salah satu strategi menjawab pelibatan kelompok rentan dalam proses pembangunan desa untuk pemenuhan hak-hak mereka, Program ini bertujuan menguatkan CSO lokal dan (CO) Community Organizer di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. CSO dan calon CO memperoleh peningkatan kapasitas melalui materi pelatihan Pengarusutamaan Gender dalam UU Desa (PUG DESA).

Materi-materi pelatihan tentang konsep gender dan inklusi sosial, perencanaan dan penganggaran responsif gender, participatory rural appraisal, strategi advokasi, analisis APBD dan APBDesa, pengorgansiasian masyarakat, pengembangan BUMDesa diberikan agar CSO dan calon CO mampu melakukan pendampingan kepada warga desa terutama kelompok rentan dan pemerintah desa agar desa menjadi lebih responsif gender. Selain itu, materi untuk pemahaman tentang keterbukaan informasi publik juga diberikan agar mengetahui prosedur akses informasi yang dibutuhkan untuk pendampingan dan diketahui oleh warga desa. IDEA bekerjasama dengan Search for Common Ground (SFCG) serta 6 CSO di kabupaten Bogor yaitu REKAM, JRK Jabar, ANBTI, Metamorfosis, YSK, PEKA dan 3 CSO di Kabupaten Tabanan yaitu Fitra Jatim, JRKI dan Kunti Bakti dengan cara menguatkan 21 Desa di 6 kecamatan dari kedua kabupaten tersebut.

Intervensi Program



Capaian Program

- Kelompok perempuan dan penyandang disabilitas memiliki kepercayaan diri terlibat dalam proses musyawarah desa, dengan meminta dukungan anggaran dari pemerintah desa untuk penguatan organisasi dan ekonomi.
- Kelompok perempuan mendesakkan usulan anggaran desa untuk training paralegal, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan perempuan, ekonomi dan kemiskinan. Program Pengelolaan Sampah menjadi terlembaga dengan sistem manajemen yang lebih baik.
- Pemerintah desa lebih terbuka untuk membagi informasi terkait pembangunan desa, dengan menerbitkan publikasi anggaran dan lebih membuka ruang untuk komunikasi dengan warga dan muncul kepedulian untuk memikirkan kebutuhan perempuan dan kelompok marginal.

B. Pelembagaan Desa Responsif Gender

Langkah-langkah memperkuat dan memastikan pengarusutamaan gender dalam implementasi UU Desa selain penguatan kapasitas dan pengorganisasian di tingkat komunitas, juga dilakukan dengan menguatkan kelembagaan yang ada di desa. IDEA bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengimplementasikan program pelembagaan PUG-PPRG (Pengarusutamaan Gender-Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) di desa. Program dilaksanakan di 6 desa, 2 desa di Kabupaten Gunungkidul yakni Desa Plembutan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul dan Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari. Sementara itu, Kabupaten Sleman dipilih 4 desa yakni Condong Catur, Wedomartani, Wukirsari dan Sardonoharjo.

Intervensi Program



Desa Plembutan telah memiliki Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa. Perdes ini memberikan jaminan kepada kelompok rentan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses musyawarah desa mulai dari level pra musyawarah desa dengan berbagai metode dan pelaksanaan musyawarah desa. Mutiara Plembutan.

Sejalan dengan Perdes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengeluarkan surat keputusan BPD No. 1/KPTS/2019 tentang pembentukan panitia musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa Plembutan tahun 2020. Dalam keputusan ini salah satunya memutuskan tentang tugas dan wewenang panitia penyelenggara musyawarah desa serta mengamanatkan untuk pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan termasuk mempersiapkan alat kerja yang aksesibel, menyediakan penerjemah, bahasa isyarat dan/atau tayangan narasi pembahasan dan pendamping khusus bagi yang memerlukan.

Perdes ini direview bersama pemerintah desa, BPD, kelompok Mutiara Plembutan dan unsur lain untuk memastikan implementasi PUG dalat berjalan lebih maksimal. Dalam proses review disepakati pentingnya pelembagaan PUG melalui peraturan desa tentang pelaksanaan PUG di desa.

Hal serupa juga dilakukan di 4 desa di Kabupaten Sleman, selain melakukan intervensi program dengan melakukan dialog secara intensif antar pemangku kepentingan di desa, juga didorong Peraturan Desa tentang Pelaksanaan PUG di desa.

Desa Condongcatur telah menyusun draft rancangan Peraturan Desa tentang implementasi PUG. Desa ini juga telah melaksanakan berbagai program PUG yang menyebar hampir di semua dusun dengan tema-tema yang berbeda. Misalnya dusun anti narkoba yang melibatkan remaja dan kampanye dan program-programnya serta berbagai program lain. Desa ini merupakan salah satu desa terbaik yang melaksanakan program pengarusutamaan gender. Tindak lanjut ini menjadi bagian dalam langkah Kabupaten Sleman menjalankan posisi sebagai mentor pelaksanaan PUG.

Capaian Program:

4 desa di Sleman dan 2 desa di Gunungkidul telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pengarusutamaan Gender di desa.



Sumiyati, anggota kelompok mutiara plembutan yang menghadiri musyawarah desa. Doc. IDEA



Tempat parkir khusus difabel di lingkungan kantor desa Plembutan. Doc. IDEA

BAGIAN 03

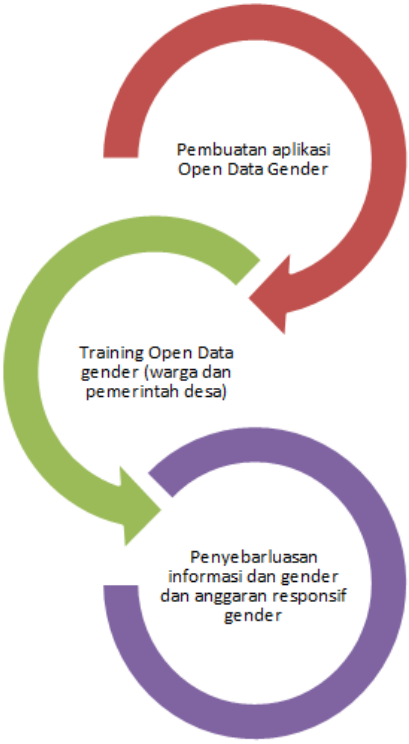
Keterbukaan Data untuk Pemenuhan Hak kelompok Rentan

A. Open Data Gender

IDEA telah mengembangkan program Open Data Gender program EQUALS sejak tahun 2018 bekerjasama dengan World Wide Web Foundation dan Open Data Labs Jakarta. Program ini berdampak cukup baik dari hasil survey manfaat program kepada sekitar 200 penerima manfaat program. Manfaat yang dirasakan pertama: penggunaan teknologi informasi dalam hal ini yang berbasis internet untuk menyebarluaskan informasi data gender, program dan anggaran yang responsif gender bisa menjadi alternatif media bagi masyarakat desa.

Media koran anggaran desa yang dicetak dan disebarkan kepada warga desa lebih aksesibel dibanding yang berbasis internet. Penyebaran informasi ini berdampak kepada peningkatan pemahaman atas informasi gender berkaitan dengan data gender, program/kegiatan dan APBDesa responsif gender. Perubahan pemahaman setelah mengetahui informasi gender desa juga mendorong perubahan sikap warga untuk terlibat dalam forum perencanaan-penganggaran desa dan kesediaan menyebarluaskan informasi kepada warga desa lain.

Intervensi Program



Capaian Program

- Open data gender memudahkan pemerintah desa dalam penyusunan data pilah yang dapat di update real time dan dimanfaatkan untuk perencanaan desa.
- Open data gender dapat diakses publik melalui website desa dan portal aplikasi open data gender. Portal ini menyediakan informasi tentang kondisi gender desa berikut program/kegiatan dan anggaran responsif gender.
- Aktivitas-aktivitas program mengubah perspektif kelompok rentan, termasuk perempuan, dan perspektif pemerintah desa untuk membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan desa. Misalnya Desa Gelangsar, mewujud dalam upaya desa memfasilitasi musyawarah khusus perempuan, forum perempuan membahas usulan program pembangunan.

Kelompok perempuan juga turut terlibat untuk mengumpulkan data gender yang dipasok kepada pemerintah desa. Hal ini menandakan, di satu sisi, inisiatif yang semakin besar dari kelompok perempuan untuk terlibat berpartisipasi dalam pembangunan desa, dan di sisi lain, keterbukaan pemerintah desa untuk berkolaborasi dengan kelompok perempuan mengalami peningkatan.

- Desa Bawuran, untuk pertama kalinya di tahun 2019, 3 kelompok perempuan yang telah cukup lama eksis di desa yaitu Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dilibatkan dalam Musrenbangdesa Bawuran dan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 17 juta rupiah untuk pemberdayaan ekonomi. Desa Bangunjiwo, pemerintah desa juga mulai melibatkan SPPR yang ada di desa Bangunjiwo dan kelompok rentan lain, seperti disabilitas, dalam Musrenbangdesa, serta memperbesar anggaran yang diperuntukkan bagi kelompok rentan.
- Komitmen pemerintah desa menguat dengan mengalokasikan anggaran desa untuk pengelolaan open data gender dalam APBDesa tahun 2020.



Agustina Erni, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, menyampaikan pentingnya PUG-PPR dalam seminar nasional Open Data Gender yang diselenggarakan IDEA, Rabu (25/09/2019)

B. Keterbukaan kontrak untuk perbaikan tata kelola air bersih

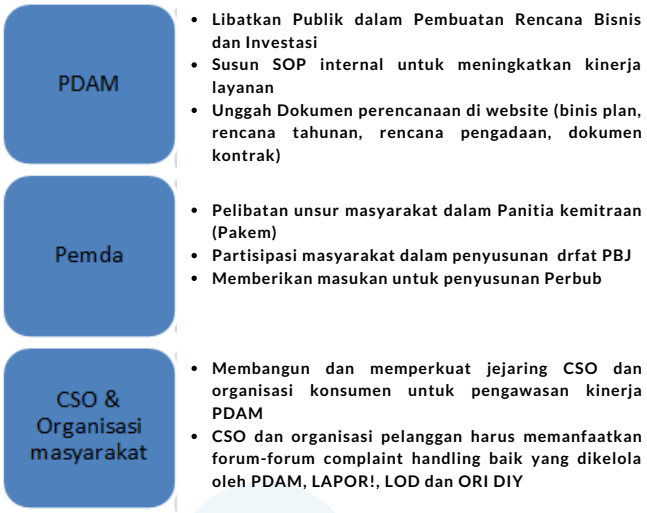
Isu keterbukaan kontrak merupakan isu baru di Indonesia dan telah didorong beberapa organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan di nasional dan daerah. IDEA bekerjasama dengan CRPG melakukan baseline study tata kelola air bersih terutama layanan PDAM Tirta Dharma.

Cakupan air bersih Pemda Bantul sampai tahun 2019 baru mencapai 91% dari total penduduk 995.264 jiwa. Cakupan tersebut terdiri dari 22% atau 223.734 jiwa dikelola oleh PDAM dan sisanya kelola oleh PAMSIMAS dan masyarakat (sumur gali dll). Sayangnya masih banyak keluhan (sambungan air sering mati) pelanggan terkait dengan pemenuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM.

Secara umum, hasil baseline menunjukkan masih ada persoalan kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan bisnis dan investasi. Selain itu, dokumen perencanaan RISPAM, Business plan, rencana tahunan, rencana umum pengadaan belum dipublikasikan.

Aspek pengadaan secara umum pengadaan infrastruktur dengan jumlah besar dilakukan oleh Dinas PUPKP dengan lelang melalui LPSE yang hasilnya kemudian dihibahkan ke PDAM. Pengadaan yang dikelola PDAM, besaran nilainya Rp. 150 juta kebawah (penunjukkan langsung). Mekanisme pengadaan di PDAM menggunakan SK Direksi yang disamakan dengan semua anggota Perpamsi. Terkait aspek transparansi pengadaan, masyarakat belum bisa mengakses dokumen pengadaan yang ada di PDAM, hanya pengumuman lelangnya saja yang boleh diunggah ke web.

Rekomendasi atas hasil baseline study adalah:



Tindak lanjut dari baseline study adalah melaksanakan program Open Contracting (OC) untuk mendukung tata kelola air bersih di Kabupaten Bantul. Program fokus pada penguatan kelompok rentan pengguna air bersih khususnya perempuan dan difabel di Kabupaten Bantul untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan air bersih mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi.

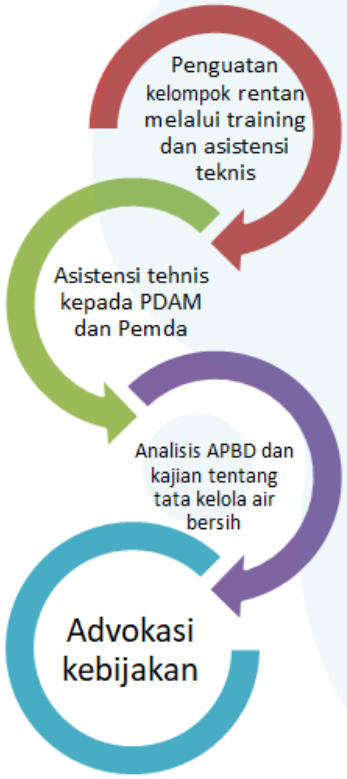
Disisi pemerintah daerah dan pengelola air bersih, IDEA mendorong adanya keterbukaan informasi kebijakan air bersih dan penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan air bersih. Melalui intervensi dua belah pihak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul yang dampaknya akan meningkatkan pelayanan publik air bersih kepada konsumen khususnya kelompok rentan. Kelompok yang diintervensi adalah: 1) Kelompok Pedagang Jamu Kecamatan Sedayu, 2) Warga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kasihan.

3) Kelompok Desa PRIMA di Kecamatan Dlingo, dan untuk kelompok difabel melibatkan kelompok Pinilih yang berasal dari Kecamatan Sedayu.

Selain itu, ini juga selaras dengan persoalan yang ada di Bantul, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan DLH Bantul kualitas air bersih di Bantul mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1) wilayah Bantul yang secara geografis berada pada bagian hilir. Banyak sungai besar mengalir ke selatan menyebabkan Bantul mendapat limpahan air yang berupa residu dari wilayah Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta, 2) Terdapat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bantul yang menjadi tempat pembuangan akhir dari wilayah Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta.

Hal tersebut mengakibatkan air tanah tercemar mineral zat besi (Fe) dan mangan (Mn), 3) Pembangunan Jamban yang tidak memenuhi standar baku dan pembuangan limbah rumah tangga serta industri yang meresap ke tanah sehingga menyebabkan air tanah tercemar bakteri e-coli. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholder di Bantul untuk dapat menyediakan air bersih layak konsumsi bagi warga masyarakatnya.

Intervensi Program



Intervensi program melalui peningkatan kapasitas ini diikuti oleh 24 orang perwakilan kelompok rentan mitra dampingan lembaga. Dari proses ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas kelompok rentan tentang pengelolaan air bersih dan sistem pengadaan barang dan jasa di sektor air bersih. Sebanyak 55 % peserta meningkat kapasitasnya dan 36% sebelum dan sesudah pelatihan kapasitasnya tetap.

Capaian Program

- Meningkatnya kapasitas kelompok rentan khususnya perempuan dan difabel tentang tata kelola air bersih di kabupaten Bantul.
- Adanya pemahaman bersama tentang menurunnya kualitas air bersih di kabupaten Bantul yang harus menjadi concern bersama semua stakeholder di Bantul.
- PDAM bersedia bekerjasama dengan IDEA untuk memperbaiki pengelolaan - air bersih di Kabupaten Bantul.
- Adanya peta pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul mulai dari aktor, peran, kewajiban, fungsi sampai dengan hubungan antar aktor.
- Terbentuknya Paguyuban Tirto Wening sebagai wadah komunikasi konsumen dan calon konsumen air bersih terkait dengan persoalan air bersih di Kabupaten Bantul.

C. Riset Investigasi Open Procurement Pembangunan Pasar – Eks Bioskop Indra

Program riset investigasi procurement pembangunan pasar – eks bioskop indra merupakan program pendek selama 5 bulan (Juni – November 2019) kerjasama antara IDEA dengan ICW. Tujuan dari program adalah melakukan investigasi atas proses pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah DIY yang mempunyai potensi korupsi.

Intervensi Program

IDEA dan ICW melakukan training kepada CSO dan jurnalis untuk terkait sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga materi tentang investasi pengadaan barang dan jasa juga diberikan untuk membekali Cso dan jurnalis dalam melakukan investigasi.



Pasca training disepakati isu yang akan di investigasi adalah Proyek pembangunan tempat relokasi di eks bioskop Indra yang merupakan proyek yang dibangun di gedung bekas Bioskop Indra dalam rangka menata pedestrian Malioboro.

Penataan kawasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi. Sumber pendanaan dari proyek ini adalah dana keistimewaan (danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gedung relokasi di eks bioskop Indra nantinya akan diperuntukan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini menempati pedestrian malioboro, khususnya di sisi timur. Ada 6 titik PKL yang setidaknya menjadi target utama pemindahan ke tempat relokasi di eks Bioskop Indra, yaitu PKL di sekitar Hotel Inna Garuda, PKL sekitar Dinas Pariwisata DIY, PKL sekitar Gedung DPRD DIY, PKL sekitar Kepatihan, PKL sekitar Mirota Batik, hingga PKL Y Unit 37 Pasar Sore.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tempat relokasi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY. Karena didanai oleh danais, maka DPUP ESDM DIY adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Hal tersebut sesuai dengan keputusan gubernur DIY nomor 132 tahun 2018 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur DIY no 282 tahun 2017 tentang penunjukan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Danais bidang urusan tata ruang tahun anggaran 2018.

Total besaran danais yang dialokasikan untuk pengerjaan proyek eks bioskop Indra ini adalah Rp 62.200.000.000. Masing-masing untuk pembangunan tahap 1 pada tahun 2018 sebanyak Rp. 44.100.000.000, pembangunan tahap 2 tahun 2018 Rp.15.100.000.000, dan pembangunan tahap 3 tahun 2019 sebanyak Rp. 3.000.000.000.

Dari proses investigasi dapat ditemukan beberapa fakta yaitu:

- Ada kesalahan pelanggaran ketentuan pengadaan dalam lelang tahap I pembangunan tempat relokasi di eks bioskop Indra, yang memilih tender cepat pada spesifikasi bangunan yang tidak sederhana (kompleks).
- Ada indikasi persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat pada lelang tahap II dan III yang memenangkan dua perusahaan berbeda dengan pemilik yang sama
- Telah terjadi pelanggaran hukum oleh Pemda DIY yang membangun proyek relokasi PKL di atas tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian negara karena kesalahan pemberian tali asih dengan biaya sebesar Rp 18.000.000.000.

Rekomendasi:
Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Inspektorat DIY untuk melakukan proses hukum terhadap adanya dugaan korupsi, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan tempat relokasi PKL di eks bioskop Indra sesuai dengan kewenangannya.

D. Satu Data Kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perpres Satu Data Indonesia Nomor 39 Tahun 2019. Perpres ini memayungi tata kelola data di sistem pemerintahan yang selama ini masih bermasalah. Implementasi satu data dapat digunakan untuk berbagai jenis isu dan sektor. IDEA secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mendorong satu data kemiskinan di DIY agar dapat data kemiskinan terintegrasi dan sasaran program lebih efektif.

IDEA memastikan kinerja pemerintah dalam pengelolaan satu data kemiskinan dapat meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran kemiskinan, meningkatkan akuntabilitas publik program penanggulangan kemiskinan dan memastikan pengelolaan pengetahuan sistem satu data dan tata kelola penanggulangan kemiskinan. Komitmen Pemda DIY untuk mewujudkan satu data kemiskinan dengan intensif melakukan koordinasi dan pertemuan update perkembangan satu data kemiskinan melalui pertemuan TKPKD DIY yang beranggotakan unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, wakil masyarakat dan CSO. Secara legal, IDEA masuk dalam keanggotaan TKPK DIY melalui SK Gubernur Nomor 159/TIM/2019, masuk dalam pokja pemberdayaan masyarakat.

Selain tata kelola data kemiskinan, IDEA juga memastikan bahwa sistem LAPOR menjadi bagian kepastian mekanisme pengaduan masyarakat atas program penanggulangan kemiskinan. Mekanisme ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kekeliruan dan program yang berulang, yang tidak perlu dan tidak tepat sasaran.

Intervensi Program

Dalam skema besar kerja-kerja IDEA, langkah yang selalu dipastikan adalah keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Intervensi program juga mengikuti situasi terkini di masyarakat maupun di level pemerintah. Mengingat intervensi program ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, maka ada proses evaluasi di tingkat internal IDEA maupun pemerintah daerah.



Kegiatan review Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah salah satu strategi untuk memastikan proses pelembagaan langkah pemerintah DIY terkait pemanfaatan satu data kemiskinan untuk penyusunan kebijakan. Catatan khusus yang harus dimasukkan dalam Ranperda adalah:

- Satu data kemiskinan sebagai pijakan aksi dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- Masyarakat sebagai aktor utama dalam pengentasan kemiskinan.
- Perlu memasukkan korelasi data mikro dan makro. Selama ini intervensi penanggulangan kemiskinan lebih ke data mikro sementara data kemiskinan yang digunakan adalah data makro sehingga intervensi yang dilakukan masih belum maksimal untuk penurunan angka kemiskinan
- Raperda belum di perkaya dengan monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dan melibatkan masyarakat sebagai kontrol kebijakan anggaran program penanggulangan kemiskinan.

Di sisi yang lain, wujud konkret dari kebijakan satu data kemiskinan adalah tersedianya aplikasi satu data kemiskinan DIY simnangkis.jogjaprov.go.id yang telah memuat data DTKS, raport kemiskinan, e-lapor khusus kemiskinan yang terintegrasi dengan SP4N. Kabupaten/kota juga telah mengembangkan aplikasi simnangkis simiskin.bantulkab.go.id dan opendatapronangkis.bantulkab.go.id, sikab.gunungkidulkab.go.id, pemberdayaan.jogjakota.go.id, pbdtm.slemankab.go.id/public. Masing-masing sistem tersebut telah memuat data dan program kemiskinan.

Capaian Program

- 6 portal satu data kemiskinan DIY dan kabupaten/kota telah tersedia.
- Kelembagaan TKPK DIY telah rutin melakukan koordinasi untuk pemanfaatan satu data kemiskinan DIY dan proses rakor yang lebih produktif.
- Tata kelola data kemiskinan akan selalu dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan DIY untuk perbaikan sasaran program.
- Perlu dipertegas intervensi program apakah akan menyasar pada data makro-BPS atau mikro DTKS dengan konsekuensi jika fokus pada data mikro maka tidak akan banyak berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan yang sudah ditargetkan oleh DIY. Jika fokus pada data makro maka bisa melakukan intervensi terhadap pengeluaran makanan dan non makanan.
- TKPKD DIY menyepakati adanya proses dan mekanisme pertukaran data kemiskinan, program/kegiatan, dan anggaran kemiskinan antara kabupaten/kota dengan propinsi.
- Monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara rutin melalui raport kemiskinan.

BAGIAN 04

Mendorong Pemilu Bersih dan Anti Politik Uang

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di Indonesia telah berjalan kurang lebih 15 tahun yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Selain itu, partai politik baru dapat mengikuti pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Namun sejak Pemilu 2004 hingga 2019, jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI belum pernah mencapai target. Hal ini ditengarai karena para caleg perempuan tidak menguasai medan perang saat bertarung, kurangnya kapasitas caleg perempuan dan keterbatasan akses pendanaan politik yang dimiliki oleh perempuan. Pendanaan ini tidak hanya untuk biaya operasional kampanye saja melainkan ongkos politik seperti ada pencalonan di partai terkait nomor urut yang harus dibayar oleh caleg.

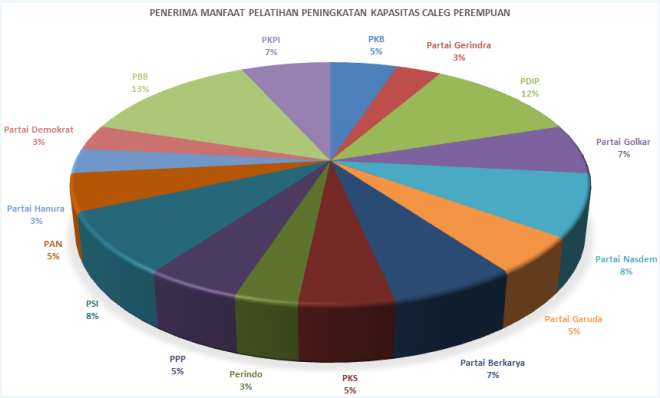
IDEA memberikan peningkatan kapasitas kepada caleg perempuan agar mampu menciptakan caleg yang dapat berproses dengan baik dalam pengambilan kebijakan publik, kampanye bersih dan anti politik uang. Proses ini akan menentukan kualitas caleg terpilih yang akan duduk menjadi anggota legislatif caleg) sehingga kebijakan publik yang dikeluarkan akan berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya kelompok rentan. Data KPU DIY yang maju dalam Pemilu 2019 terdapat 2.829 orang Caleg di DIY yang terdiri dari laki-laki 1.590 orang dan perempuan 1.239 orang. Mereka adalah orang-orang yang akan memperebutkan suara dari 2.695.805 orang penduduk di DIY yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Jika mengacu pada aturan kuota 30% perempuan yang harus dipenuhi oleh partai, hampir semua partai politik telah memenuhi aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

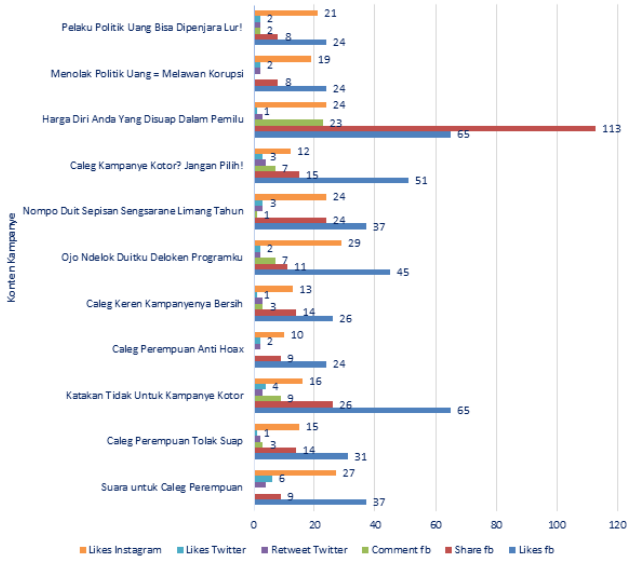
No	Partai	L	P	Total	Keterwakilan Perempuan
1	PKB	139	114	253	45%
2	Gerindra	151	109	260	42%
3	PDIP	160	112	272	41%
4	Golkar	153	119	272	44%
5	Nasdem	152	109	261	42%
6	Garuda	16	20	36	56%
7	Berkarya	80	66	146	45%
8	PKS	170	105	275	38%
9	Perindo	62	59	121	49%
10	PPP	65	48	113	42%
11	PSI	41	30	71	42%
12	PAN	146	116	262	44%
13	Hanura	56	57	113	50%
14	Demokrat	134	119	253	47%
15	PBB	62	52	114	46%
16	PKPI	3	4	7	57%

Sumber : diolah dari data DCT KPU DIY 2019.

Sebanyak 62 kandidat caleg perempuan DIY untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari 16 partai politik terlibat dalam pelatihan caleg. Materi pelatihan strategi melaksanakan kampanye bersih, anti politik uang dan bagaimana memilih kandidat caleg berdasarkan latar belakang mereka. Para caleg merasakan manfaat dari pelatihan dengan peningkatan pengetahuan naik dari 7,2 menjadi 7,6.



Pasca pelatihan, IDEA bersama dengan para caleg DIY menyiapkan berbagai media kampanye pemilu bersih dan anti politik uang yaitu stiker, pamflet, flyer, artikel, kaos, ILM (iklan layanan masyarakat) dan talkshow radio, kanal sosial media dan forum-forum publik seperti CFD (Car Free Day) dan Sunmor (Sunday Morning) di kawasan UGM. Interaksi dalam berbagai media informasi tersebut paling banyak melalui FB sebanyak 113 interaksi untuk materi kampanye "Harga diri anda yang Disuap Dalam Pemilu".





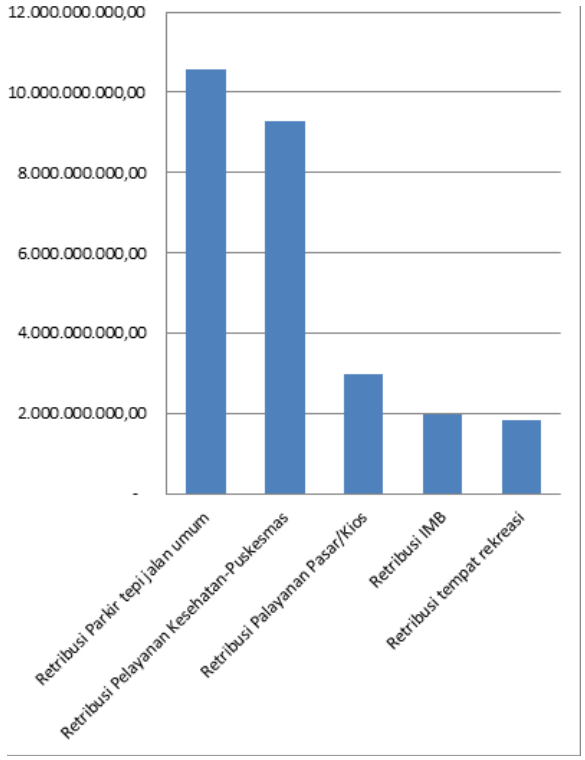
BAGIAN 05

Audit Sosial untuk Pengawasan Pembangunan

Audit sosial merupakan proses pemantauan pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan secara partisipatif oleh warga. IDEA secara konsisten melakukan kampanye, pelatihan, praktek audit sosial dan pelembagaan audit sosial di berbagai daerah dan berbagai isu sejak 7 tahun terakhir.

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran program IDEA pada tahun 2019 adalah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Program mendorong pelembagaan sistem akuntabilitas sosial isu kesehatan terutama pelayanan kesehatan dasar. Di Jember telah terbentuk FORASKER(Forum Akuntabilitas Sosial Kesehatan Jember) yang beranggotakan kader-kader perempuan yang mendampingi warga dalam advokasi kasus-kasus layanan BPJS Kesehatan. Forasker telah memperoleh serangkaian intervensi program dengan pelatihan audit sosial dan praktek audit sosial pelayanan kesehatan, pelatihan anggaran dan pendampingan. Bersama dengan tim asistensi teknis IDEA, FORASKER melakukan analisis APBD Kabupaten Jember Tahun 2018 terkait alokasi anggaran umum dan alokasi anggaran untuk kesehatan dan monev pelayanan kesehatan.

Grafik Penyumbang Retribusi Daerah Terbesar Tahun 2018



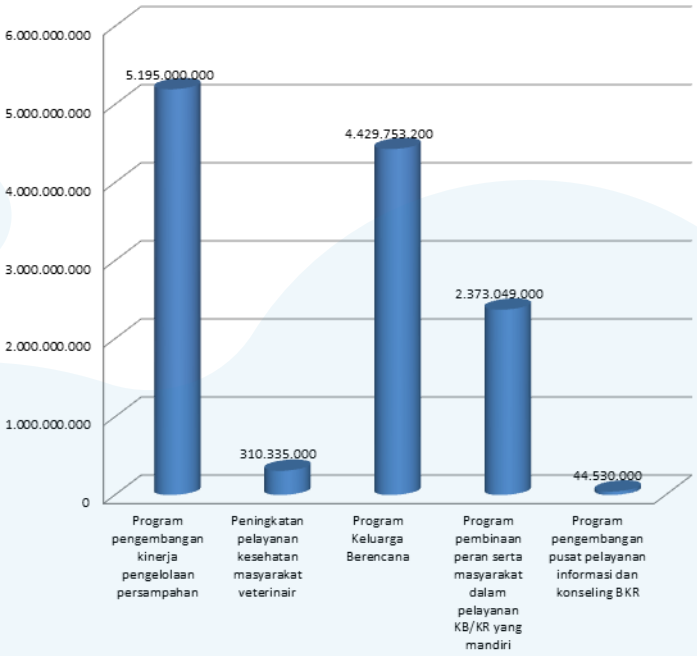
Diolah dari dokumen APBD Kabupaten Jember Tahun 2018

Secara garis besar, dari hasil analisis anggaran kesehatan diperoleh hasil bahwa isu kesehatan menjadi salah satu isu prioritas di Kabupaten Jember. Pendapatan sektor kesehatan sebesar Rp. 302.327.869.422,92 yang bersumber dari 2, yaitu PAD dan pendapatan dari dana transfer. Retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 9.298.265.275, - menempati posisi kedua penyumbang terbesar dalam PAD Kabupaten Jember. Selain itu ada pendapatan dari 3 RSUD yang dikelola oleh pemda sebesar Rp. 262.339.844.147,92. Pendapatan dari dana transfer berupa dana kapitasi jaminan kesehatan untuk 24 puskesmas sebesar Rp 30.675.399.000,-.

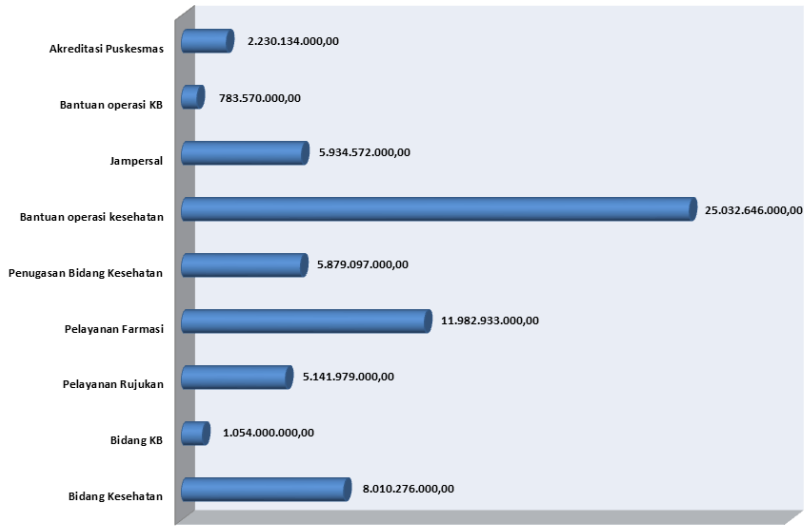
Pada ayat (2) : "Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 % (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji". Untuk program standarisasi pelayanan kesehatan sebesar Rp.550 juta atau 0,07% terhadap total belanja kesehatan.

Sementara itu prosentase rasio belanja evaluasi pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan terhadap belanja kesehatan sebesar 0,05%. Hal ini menunjukkan jika pemerintah Kabupaten Jember sudah memiliki komitmen yang baik terhadap urusan wajib kesehatan, namun untuk melakukan evaluasi pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Program Penunjang Peningkatan Kesehatan Masyarakat di OPD non Dinas Kesehatan



DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018



Diolah dari dokumen APBD Kabupaten Jember Tahun 2018

Hasil analisis APBD sektor kesehatan Tahun 2018 Kabupaten Jember kemudian diadvokasi melalui APBD Perubahan Tahun 2019.

Capaian Program

- Policy brief yang disusun telah disampaikan kepada ketua Banggar DPRD Kabupaten Jember, Bappeda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran daerah di tahun 2019.
- Hasil SKM ini digunakan oleh Pemda Jember untuk membuat tren peningkatan kinerja pelayanan publik sektor kesehatan. Jika ditilik dari hasil SKM tahun 2018 maka pada tahun 2019 ini ada peningkatan pelayanan kesehatan, dimana nilai IKM tahun 2018 adalah 76,13 dengan kategori "C" yang artinya kinerja layanan bidang tersebut kurang baik. Sedangkan tahun 2019 sebesar 84,091 dengan kategori "B".
- Policy brief yang diajukan kepada Pemda Jember diterima dan ditindaklanjuti dengan adanya anggaran SKM dalam APBD tahun 2019. Alokasi anggaran SKM tahun 2019 tidak dilakukan per bidang/sektor tapi dilakukan dalam 3 tahapan yang meliputi : Pemetaan awal survei menyeluruh lintas sektor/bidang sebesar Rp. 333.750.000; Pemetaan lanjutan survey menyeluruh lintas sektor/bidang senilai Rp. 333.750.000 dan Evaluasi menyeluruh lintas sektor/bidang sebesar Rp. 360.000.000.
- FORASKER (Forum Akuntabilitas Sosial Kesehatan Jember) telah menjadi mitra strategis pemerintah Jember dalam mengawal kebijakan pelayanan kesehatan.
- Tim program dan FORASKER bersama dengan bagian hukum setda Jember telah menyusun Perbup tentang Forum Konsultasi Publik. Draft Perbup ini telah diterima oleh kepala bagian hukum dan disampaikan kepada Bupati dan rancangan RAD SDGs.
- Bappeda – UNEJ – IDEA – YPSM dan FORASKER melakukan kerjasama pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas layanan BPJS PBI mengacu PERMENPAN RB No 14 Tahun 2017. SKM tahun 2019 ini dilakukan di 10 Kecamatan di Kabupaten Jember yang meliputi Puskesmas Banjarsengon, Kencong, Sumberbaru, Silo II, Ajung, Wuluhan, Mumbulsari, Nogosari, Puger dan Ledokombo.
- SKM sudah dijalankan tahun 2019, mengacu pada Permenpan RB No 14 tahun 2017 meliputi 9 aspek 1) persyaratan, 2) sistem, mekanisme dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) biaya/tarif, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) kompetensi pelaksana, 7) Perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9) sarana dan prasarana.

Dari proses SKM yang dilakukan tahun 2019 ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya :

- Nilai IKM-nya 84,091. Hal ini menunjukkan bahwa menurut penilaian masyarakat mutu pelayanan puskesmas Kabupaten Jember 2019 masuk dalam kategori "B" yang artinya kinerja layanan bidang tersebut adalah Baik. Nilai IKM ini terpaut 4,22 dari kategori A (Kinerja Sangat Baik) dengan nilai IKM 88,31.
- Sebagian aspek masih terjadi kesenjangan antara harapan dan penilaian terhadap layanan yang diterima, kecuali aspek biaya/tarif yang skor kepuasan melebihi harapan.

BAGIAN 6

Memperkuat kapasitas internal untuk Mobilisasi Sumberdaya

A. Pengembangan Knowledge Management

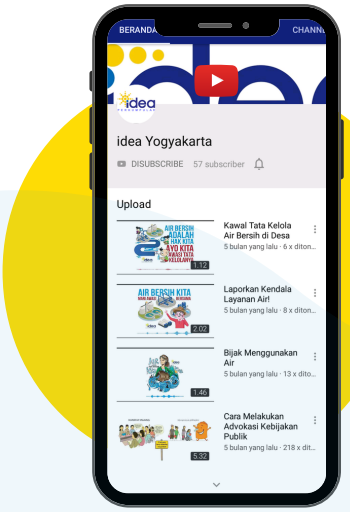
Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan publik dibanjiri informasi dari berbagai sisi dan berbagai bentuk. Situasi ini belum didukung oleh masyarakat dimana belum memiliki daya kritis yang baik dalam menerima informasi publik. Banjir informasi tidak mendorong masyarakat untuk merespon dengan memperbanyak literasi yang baik, namun justru menyebabkan problem baru seperti konflik sosial, penyebaran kabar bohong, dan sebagainya.

Dalam situasi demikian, pengelolaan pengetahuan IDEA harus mampu mengambil peluang yang lebih strategis untuk menangkap perkembangan teknologi dan inovasi serta mengembangkan kapasitas untuk menuliskan pengalaman yang lebih reflektif dengan kualitas tulisan yang baik. Wacana dan praktek yang sudah dilakukan selama hampir 20 tahun harus dikelola dengan baik, dengan dukungan pengelolaan knowledge management harus kuat untuk membingkai kerangka yang ada.

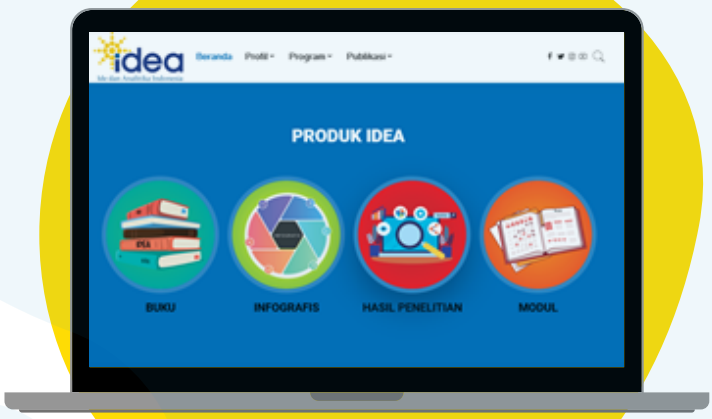
Dalam definisi umum. pengelolaan pengetahuan adalah upaya yang sadar dan sengaja untuk mengelola informasi dan pengetahuan sebagai aset lembaga, menjaga keberlanjutan keberadaan pengetahuan itu dalam lembaga, termasuk didalamnya upaya mengembangkan dan menangkap pengetahuan, pembelajaran dan pengalihan pengetahuan, serta pemanfaatan pengetahuan.

Knowledge management memiliki misi "Meningkatkan Pengelolaan Pengetahuan sebagai Penyedia Informasi dan Produk Pengetahuan untuk Pengembangan Program dan Advokasi yang lebih luas dengan Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi". Isu strategis ini diturunkan ke dalam 3 sub-bidang: pertama, sub-bidang riset dan data; kedua, sub-bidang publikasi dan informasi; dan ketiga, pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan.

Kegiatan literature research sudah dilakukan yakni Perhutanan Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kegiatan publikasi dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan media online dan offline.



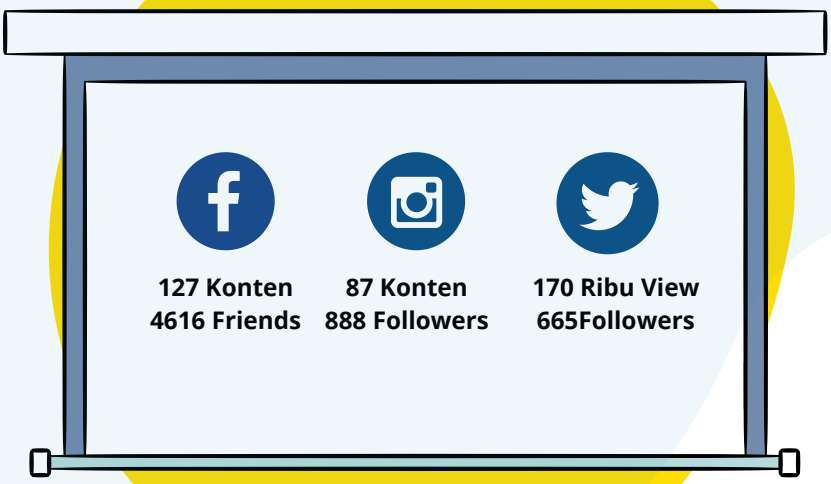
37 Subcriber 24 Videos



17.953 Visitors

Kegiatan literature research sudah dilakukan yakni Perhutanan Sosial dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kegiatan publikasi dan informasi dilakukan dengan memanfaatkan media online dan offline.

17.953 Visitors



127 Konten 4616 Friends

87 Konten 888 Followers

170 Ribu View 665Followers

Selain itu, IDEA juga terlibat aktif dalam berbagai jaringan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam melakukan gerakan advokasi dan perubahan sosial. Dalam jaringan juga terjadi proses berbagi pengetahuan dan pengalaman antar organisasi dari berbagai wilayah dalam kerja-kerja advokasi. Jaringan-jaringan CSO dimana IDEA terlibat aktif adalah:

1. FOINI (Freedom of Information Network) Indonesia.
2. PWYP (Publish What You Pay Indonesia)
3. MP3 Nasional (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)
4. KMSTP (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan)
5. OGP Nasional dan Global (Open Government Partnership).
6. AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta).
7. Forum PRB DIY (Pengurangan Resiko Bencana).

Selain menjadi anggota koalisi atau jaringan, IDEA juga menjadi CSO representative dalam EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) bersama dengan wakil dari Article 33 dan PWYP Indonesia.

B. Pengembangan Idea Resource Center

IRC merupakan strategi fundraising berupa jasa konsultansi dengan melibatkan expert yang memiliki keahlian di bidangnya, terutama kapasitas dalam melayani jasa konsultan monitoring dan evaluasi proyek, riset kebijakan, pelatihan-pelatihan di isu community development, perencanaan penganggaran, pengurangan resiko bencana, audit sosial dan jenis layanan lainnya.

Tahun 2019, IRC bernama IRC Analitika Indonesia menyesuaikan perubahan akta IDEA. IRC Analitika Indonesia telah melayani lebih dari 20 jenis jasa konsultan untuk riset, studi baseline, studi PAR, pelatihan advokasi anggaran dan audit sosial, monitoring dan evaluasi PUG-PPRG dan program kemiskinan dan jasa lainnya. Mayoritas pengguna jasa konsultan IRC Analitika Indonesia adalah jaringan CSO baik internasional, nasional dan daerah maupun pemerintah pusat dan daerah.

C. Kelembagaan dan Organisasi

Perkumpulan IDEA dikelola dengan manajemen yang profesional dengan melibatkan pegiat yang memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan rencana-rencana strategis organisasi untuk pencapaian visi misi organisasi.

Struktur organisasi IDEA terdiri atas divisi knowledge management, divisi keuangan, divisi operasional, divisi program, dan divisi pengembangan fundraising. Dalam periode Tahun 2019 pegiat IDEA berjumlah 14 orang terdiri atas 8 orang pegiat perempuan dan 6 orang pegiat laki-laki dengan rincian sebagai berikut

Kategori Personal	Tahun 2019	L	P
Dewan Pengurus	3 orang	1	2
Keuangan	3 orang	0	3
HRD dan Operasional	2 orang	2	0
Knowledge management	5 orang	2	3
Staf Paruh Waktu	1 orang	1	0
Total	14 orang	6	8

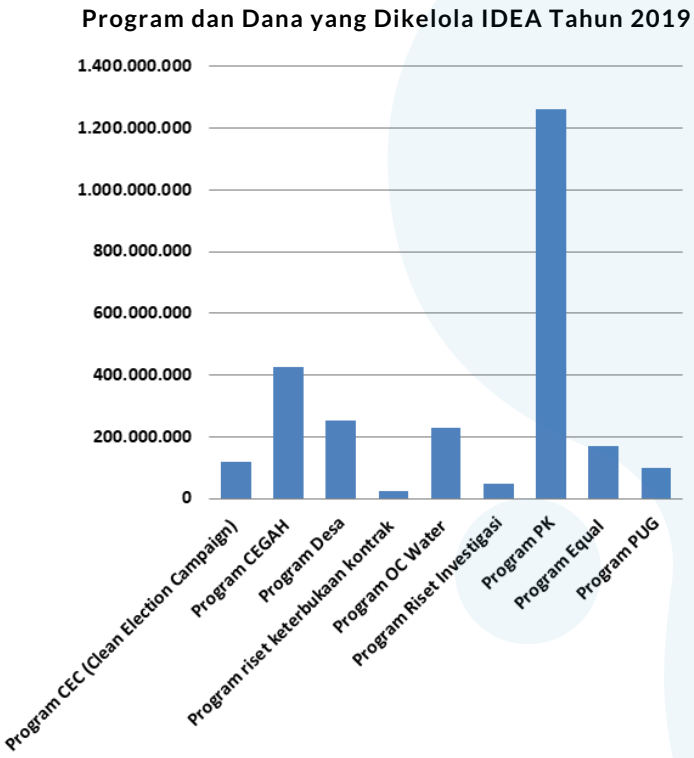
BAGIAN 07

LAPORAN POSISI KEUANGAN TAHUN 2019

A. Dana Program yang dikelola IDEA

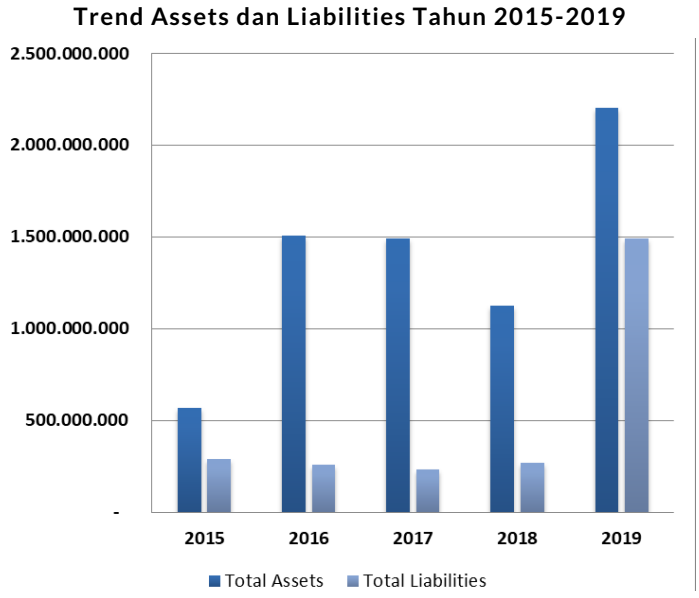
Dalam kurun waktu tahun 2019, IDEA mengelola 9 program dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp.2,7 Milyar. Trend ini menurun dibandingkan pada tahun 2016 dimana IDEA mengelola dana program lebih dari Rp.7 Miliar dalam satu tahun, dan Tahun 2017 mengelola dana program lebih dari Rp.5 Miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Sumber dana program masih didominasi donor, namun IDEA juga mengelola program dana hibah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia untuk program Pengarusutamaan Gender. Prinsip-prinsip pengelolaan dana program tetap mengacu kepada Prosedur Operasi Baku Sistem Keuangan IDEA yang menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.



Selain itu, laporan keuangan IDEA, baik laporan keuangan program dan laporan keuangan lembaga juga secara rutin setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terpercaya dan memiliki reputasi dalam melakukan audit berbagai perusahaan maupun organisasi non profit dan pemerintah. Sejak Tahun 2013, opini dari KAP atas hasil audit laporan keuangan IDEA adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Total Aset dan Liabilitas



C. Total Pendapatan dan Beban



PENUTUP

Atas capaian-capaian kinerja program dan keuangan selama Tahun 2019, segenap bagian organisasi IDEA menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung program IDEA.

Tantangan gerakan organisasi masyarakat sipil kedepan semakin banyak, terutama aspek perkembangan teknologi informasi agar menjadi bagian dalam memastikan transformasi perubahan sosial yang lebih substantif, adil dan setara.

Oleh karena itu, IDEA sangat berharap dukungan-dukungan penuh dapat terjadi secara konsisten baik dukungan sumberdaya dari internal dan eksternal maupun dukungan dalam kerja-kerja kolaborasi maupun engagement antar pemangku kepentingan sehingga visi misi organisasi dapat tercapai dan perubahan sosial secara umum dapat terwujud.

idea

Ide dan Analitika Indonesia